

BAB I

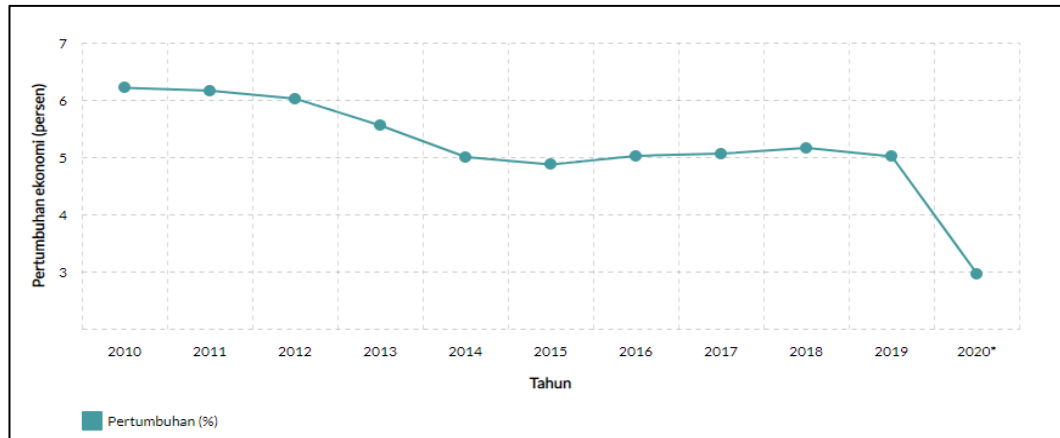
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia di suatu negara. Perekonomian dalam suatu negara akan berhasil ketika terjadi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan proses jangka panjang, dimana kesejahteraan itu tercermin dengan peningkatan output perkapita serta adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga meningkatkan konsumsi barang dan jasa (Syahputra, 2017).

Indonesia merupakan negara berkembang yang turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melaksanakan pembangunan ekonomi secara bertahap dan dibarengi dengan usaha pemerataan dan menjaga kestabilan perekonomiannya. Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan ketimpangan merupakan hal yang harus diselesaikan di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhannya. Kemiskinan adalah permasalahan yang sangat mendasar yang dengan peningkatan jumlahnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Imanto *et.al.*,2020). Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan indikator dalam pemenuhan kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan (BPS, 2021). Sementara menurut world bank kemiskinan diukur dengan menggunakan indikator pendapatan dan asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan perumahan, tingkat Kesehatan dan Pendidikan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk memberantas kemiskinan dilakukan. Namun tentu saja perekonomian Indonesia tidak lepas dari fluktuasi perekonomian (Syahputra, 2017). Berikut ini adalah gambaran perekonomian Indonesia selama 10 tahun terakhir :

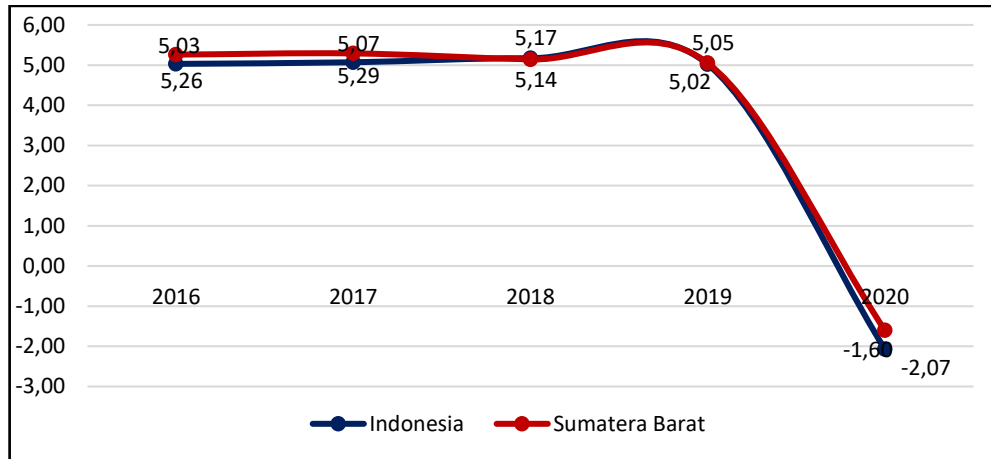


Sumber : BPS

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2020

Pada grafik di atas, terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perekonomian masih cenderung stabil dari tahun 2010- 2019. Namun pada tahun 2020 terlihat jelas bahwa terjadi penurunan dalam perekonomian yang sangat drastis hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mana pada saat sekarang ini seluruh dunia, termasuk Indonesia sedang menghadapi pandemi yang menyebabkan krisis perekonomian. Pandemi covid- 19 menyebabkan terhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat serta hilangnya kepercayaan konsumen (OECD, 2020).

Salah satu provinsi di Indonesia yang berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat masih dapat dikatakan stabil namun masih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pada tahun 2016 Provinsi Sumatera menduduki peringkat ke 18 dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,26 persen. Namun pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan PDRB menduduki peringkat ke 20. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan trend pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (BPS, 2021). Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain adalah karena perekonomiannya masih cenderung berpusat di sector pertanian yang mempengaruhi 23% terhadap perekonomian Sumatera Barat (Hendra, 2021).



Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat 2016-2020
 Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, data diolah (2021)

Pertumbuhan ekonomi memiliki acuan dalam pengukurannya. Salah satu acuan dalam melihat pertumbuhan ekonomi terutama stabilitas dalam perekonomian adalah inflasi (Simanungkalit, 2020). Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian yang menyebabkan naiknya harga-harga barang secara terus menerus dan menyeluruh. Hal ini terjadi karena adanya kondisi ketidakseimbangan antara arus uang dengan arus barang (Yulianti & Khairuna, 2020). Naik turunnya inflasi akan menyebabkan gejolak perekonomian. Hal ini membuat pemeliharaan stabilitas harga juga harus diperhatikan dan menjadi tujuan utama kebijakan ekonomi makro pada sebagian besar negara di dunia (Umaru dan Zubairu, 2012).

Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia tentunya memiliki permasalahan ekonomi seperti inflasi tinggi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi harus diupayakan tetap rendah dan stabil agar tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Salim dkk, 2021). Inflasi yang tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonom karena meningkatkan harga barang cenderung naik dan permintaan terhadap barang tersebut menurun secara berkelanjutan (Yulianto, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2018) dengan menggunakan data periode 2006-2015 yang mana hasilnya kenaikan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dan sebaliknya jika inflasi rendah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Jika kita melihat melalui perspektif ekonomi islam, zakat merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Jedidia dan Guerbouj (2020) yang

menunjukkan bahwa zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan sarana untuk membersihkan harta, membersihkan diri dari dosa serta untuk menunjukkan keimanan seseorang. Hal ini seperti yang ada pada firman Allah dalam Al- Quran Surah At- Taubah ayat 103 berikut ini :

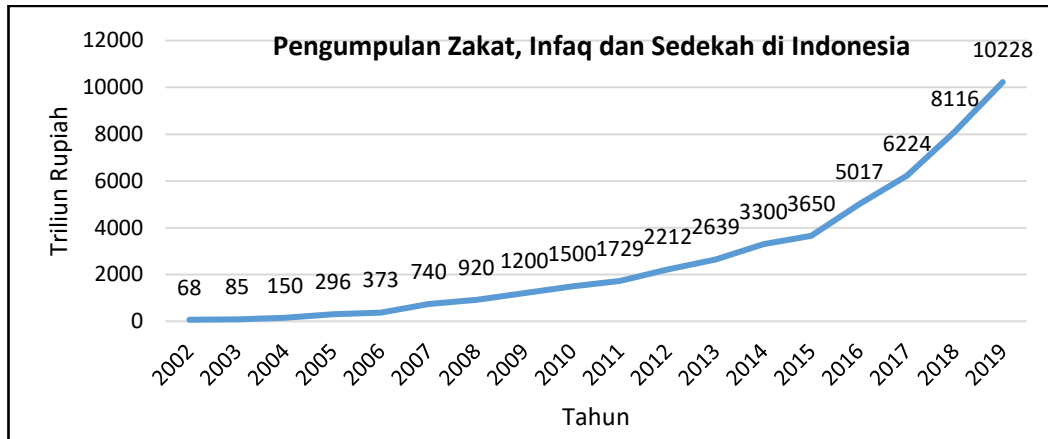
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّصَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. At – Taubah : 103)

Zakat sangat berkaitan dengan kemiskinan karena tujuan zakat yang lebih besar daripada menyantuni masyarakat yang kurang mampu secara konsumtif namun tujuan zakat lebih kepada pengentasan kemiskinan (Abdurrahman Qadir, 2001). Zakat memiliki potensi serta menjadi peluang terbesar bagi pemerintah untuk memberantas kemiskinan (Kamarni & Saputra, 2021). Dana zakat termasuk salah satu sumber dana yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Puwanti, 2020). Hal ini dikarenakan, jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Maka dari itu diharapkan dana zakat dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi.

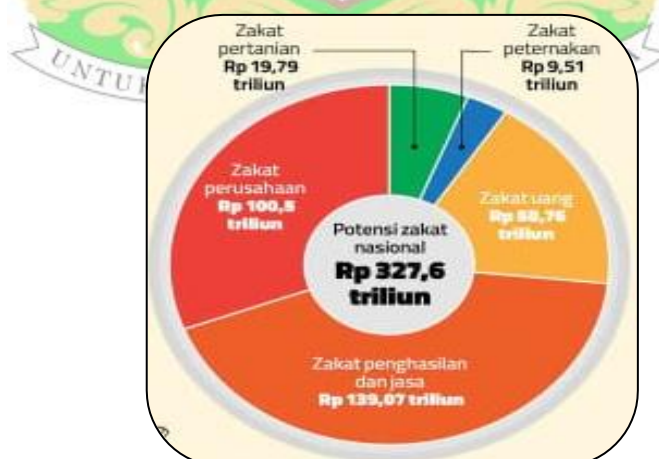
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat sesuai dengan syariat islam dan peraturan yang telah ditetapkan. Lembaga zakat ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamarni & Saputra, 2021). Penghimpunan zakat, infak, sedekah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang dapat kita lihat pada grafik, yaitu sejak tahun 2002-2019.



Gambar 1.3 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS tahun 2002-2019

Sumber : Statistik Zakat Nasional, 2019

Pada tahun 2018, potensi dana zakat di Indonesia mencapai 3 persen dari seluruh PDB yaitu sebesar 233 triliun. Namun pengumpulan zakat masih minim yang hanya sebesar 8,1 Triliun Rupiah atau 3,4 persen dari potensi zakat yang ada. Selanjutnya pada tahun 2019 potensi zakat di Indonesia meningkat menjadi 233,6 Triliun Rupiah dan penghimpunan zakat sebesar 10,22 Triliun Rupiah. Pada tahun 2020 Badan Amil Zakat Nasional berhasil meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah sebesar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dana zakat semakin meningkat hingga mencapai 12,5 Triliun Rupiah meskipun tengah dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 ini. Hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar. (BAZNAS, 2020). Untuk potensi zakat 2019 ditunjukkan pada gambar dibawah ini :



Gambar 1.4 Potensi Zakat Nasional Tahun 2019

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2019

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk muslim di Sumatera Barat sebesar 97,48 persen dan sisanya beragama Kristen terutama di Kepulauan Mentawai yang mayoritas menganut agama Protestan dan Katolik. Dalam hal penerimaan zakat di provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja karena potensi zakat di Sumatera Barat sangat besar dimana mayoritas penduduknya adalah muslim (BPS, 2021). Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 BAZNAS Sumatera Barat berhasil mengumpulkan zakat sebesar 239 Milyar (BAZNAS Sumatera Barat, 2021). Jumlah ini masih terbilang belum optimal karena potensi zakat berada di angka triliun. Tercatat potensi zakat di Sumbar sudah mencapai 1,7 triliun dimana potensi ini terus meningkat hingga di tahun 2021.

Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia termasuk di Sumatera Barat sangat besar namun pengumpulan zakat masih belum menunjukkan angka optimal. Potensi zakat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat dihitung berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Potensi zakat suatu wilayah yang meliputi seluruh objek diukur menggunakan IPPZ yang terdiri dari potensi zakat peternakan, zakat uang, zakat pertanian, zakat penghasilan dan zakat perusahaan. Ini merupakan komponen utama dalam Indeks Pemetaan Potensi zakat (IPPZ, 2019).

Pengamat ekonomi Islam menyatakan bahwa, penyebab rendahnya pengumpulan zakat ditengan potensinya yang terus meningkat adalah kebanyakan dari masyarakat Indonesia membayar zakat secara langsung atau melalui lembaga informal sehingga tidak tercatat (Wibisono, 2017). Selain itu penyebab lainnya yang menyebabkan masih rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia adalah belum meratanya kompetensi dan kapasitas amil zakat di Indonesia, belum meratanya kemampuan program dan skill yang baik dalam lembaga amil di Indonesia, kurangnya kolaborasi atau sinergi dalam pemerataan penyaluran program serta kurangnya akuntabilitas lembaga amil zakat di Indonesia.

Pengumpulan zakat juga dipengaruhi oleh variable makro salah satunya inflasi. Jika inflasi meningkat maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan masyarakat cenderung memanfaatkan pendapatannya untuk

kebutuhan sehari-hari sehingga kemampuan untuk membayar zakat juga berkunrang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hariyani *et al.*, (2018) inflasi memiliki pengaruh yang negative signifikan terhadap pengumpulan zakat dalam jangka panjang. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Afendi (2018) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan zakat nasional. Maka dari itu inflasi juga perlu diperhatikan dalam hal pengumpulan zakat ini.

Maka kondisi-kondisi tersebut mendorong munculnya suatu gagasan yang dikemukakan oleh Forum Zakat (FOZ) yaitu gagasan Digizakat atau zakat digital (Budiyanto, 2019). Digitalisasi zakat ini mulai disepakati sejak tahun 2019 pada *wolrd forum zakat* yang diadakan pada awal November 2019 lalu. Digitalisasi memang merupakan suatu hal yang tidak asing lagi terdengar bagi kita di zaman sekarang. Secara harfiah digitalisasi merupakan proses alih media yang biasanya berbentuk cetak menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi. Berbagai sektor dalam kehidupan telah melakukan upaya digitalisasi. Pengembangan inovasi dibidang teknologi digital tak henti-hentinya dilakukan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari (Sofyan, 2020).

Digitalisasi dalam zakat berarti memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan zakat seperti melalui transfer, melalui platform *e-commerce*, melalui *fintech* dan sebagainya. Menurut penelitian yang dilakukan Myovella *et al.*, (2019) yang melakukan studi tentang pengaruh dan kontribusi teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OECD dan Sub-Sahara Afrika, menunjukkan bahwa teknologi digital berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua kelompok negara tersebut. Teknologi digital juga berkontribusi di berbagai sector perekonomian. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini memfokuskan kepada analisis pengaruh digitalisasi khusus untuk pengumpulan dana zakat. Jadi tidak membahas pengaruh digitalisasi secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian terdahulu.

Jika memanfaatkan teknologi digital dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan zakat menjadi inovasi yang sangat baik pada saat ini. Masyarakat millenial merupakan manusia yang memiliki ketergantungan yang tinggi dan

menginginkan sesuatu yang mudah, cepat dan instan dengan menggunakan perangkat-perangkat digital (Purwakanta, 2019). Maka dari itu adanya pengumpulan zakat dengan menggunakan platform digital akan berdampak pada peningkatan penerimaan dana zakat. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) yang menemukan bahwa adanya digitalisasi zakat berpengaruh signifikan positif sebesar 55,9 persen terhadap potensi penerimaan dana zakat. Berdasarkan data dari BAZNAS pada tahun 2019 pengumpulan zakat melalui platform digital seperti transfer dan *e-payment* sudah mencapai angka 279 milyar. Jumlah ini meningkat sebesar 85 milyar dari tahun sebelumnya. Angka ini cukup besar dalam meningkatkan penerimaan zakat secara digital. Sementara itu pada tahun 2020 sampai 2021, BAZNAS menyatakan bahwa kontribusi platform digital ini kembali meningkat sebesar 30 persen sampai 35 persen (BAZNAS, 2022).

Selain itu digitalisasi zakat juga dapat mengurangi resiko pencurian dana zakat dan masuknya uang palsu. Kasus penggelapan dana zakat pernah terjadi pada lembaga amil zakat yang berada di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada tahun 2012 lalu. Dengan adanya digitalisasi zakat maka akan mengurangi resiko terjadinya kasus tersebut. Menurut PKES-UI, adanya pembayaran zakat secara digital mempengaruhi perilaku individu dalam membayar zakat. Banyaknya alternatif dalam pembayaran zakat seperti melalui transfer, platform *e-commerce*, crowdfunding dapat berpengaruh positif terhadap niat masyarakat dalam membayar zakat (Kasri, 2021).

Pemberlakuan digitalisasi zakat juga dirasakan oleh situs resmi hasil *rebranding* Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) dan Lazisnu.org, sebuah situs lembaga zakat nasional. Portal-portal tersebut memakai berbagai logo dompet digital, LinkAja, OVO, DANA, GoPay dan lainnya yang turut memudahkan untuk membayar zakat. Sejak Januari hingga April 2021 Lazisnu mencatat bahwa hampir 42 persen orang Indonesia sudah membayar zakat, infak serta sedekah melalui platform digital. Kontribusi platform digital ini sudah menunjukkan peningkatan daripada tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2020 selain zakat serta donasi lain yang memanfaatkan platform digital, khususnya GoPay berhasil mengumpulkan donasi hingga mencapai Rp 136 Milyar. Pada event

BAZNAS Award tahun 2020 Gopay berhasil menjadi platform mitra pengumpulan zakat melalui *financial technology* terbaik.

Menurut Sulistiyawati (2021), adanya kolaborasi seperti GoPay dan platform digital lainnya dengan lembaga amil zakat dan berbagai mesjid di Indonesia tentunya akan mendorong pengelolaan, pengumpulan serta pendistribusian zakat kedepannya. Selain menggunakan dompet digital zakat, ada juga pemanfaatan respon cepat atau disebut dengan QR yang akan memudahkan dan mempercepat transaksi pembayaran zakat oleh masyarakat.

Adanya kemajuan dalam bidang teknologi digital dalam hal pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat merupakan salah satu kemajuan yang harus didorong terus menerus (Purwakananta, 2019). Namun disamping itu tentunya banyak tantangan dalam menggunakan teknologi digital untuk zakat ini. Tantangan yang dihadapi mulai dari tantangan legal syariah maupun regulasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pembayaran, pengumpulan dan pengelolaan zakat. Maka dari itu haruslah ada regulasi yang baik disamping digitalisasi zakat.

Tantangan lainnya dalam memanfaatkan teknologi digital adalah masih kurangnya literasi masyarakat, dibandingkan dengan penggunaan teknologi digital itu sendiri. Bahkan masyarakat muslim sendiri belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Namun jika digitalisasi zakat ini terus dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh BAZNAS, maka akan memudahkan dalam mendistribusikannya kepada para mustahik, serta memudahkan pengelolaan dana oleh lembaga zakat di Indonesia. Selain itu mengingat pada zaman sekarang, generasi millennial sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi, digitalisasi zakat dapat mendorong dan meningkatkan keinginan generasi millennial untuk melakukan pembayaran zakat yang dapat dilakukan dengan transaksi yang lebih cepat dan mudah (Purwakananta, 2019).

Digitalisasi zakat diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Dampak digitalisasi ini juga diharapkan dapat dirasakan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau di masa depan. Hal ini dikarenakan banyaknya kemudahan yang akan dirasakan apabila pemanfaatan teknologi digital dimaksimalkan dalam hal pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat. Transaksi pembayaran zakat akan semakin mudah serta

pengelolaannya lebih akurat. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohimah (2020) di Banten, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya digitalisasi zakat berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan dana zakat. Pemaparan diatas juga melihat adanya pengaruh variable makro yaitu inflasi dalam pengumpulan zakat dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut maka menurut penulis perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai pengaruh adanya digitalisasi zakat ini terhadap perekonomian dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh zakat dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat, (Kasus Pada Zakat Digital)”.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang dipaparkan diatas menunjukkan pentingnya digitalisasi zakat untuk memaksimalkan potensi pengumpulan zakat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Dengan adanya digitalisasi zakat maka akan mempermudah proses pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan masalah yang diajukan adalah apakah zakat yang berfokus pada zakat yang dikumpulkan secara digital dan inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui apakah zakat yang dikumpulkan secara digital serta inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.